

# **Analisis Penggunaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan**

**Sita Bela<sup>1</sup>, Sarmini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [sita.19020@mhs.unesa.ac.id](mailto:sita.19020@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup> , [sarmini@unesa.ac.id](mailto:sarmini@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Pengentasan kemiskinan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengangkat kondisi perekonomian masyarakat yang lemah menuju kondisi ekonomi yang stabil sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penggunaan Dana bantuan program keluarga harapan dalam di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Data dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini telah dipilih dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian, yaitu dari penerima bantuan PKH, Ketua kelompok PKH dan Pendamping PKH. Hasil penelitian menunjukkan 1) Penggunaan bantuan PKH. Mencakup kebutuhan Pendidikan yang berupa penyediaan alat tulis, pembayaran sekolah, uang saku dan transportasi, proses pendampingan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendamping PKH, komunikasi.

**Kata kunci:** *Pengentasan Kemiskinan, PKH*

## **Abstract**

Poverty alleviation is an effort or action taken to lift the economic conditions of weak communities towards stable economic conditions so as to reduce poverty in Indonesia. The purpose of this study was to determine the use of the Hope Family Program assistance funds in Pesanggrahan Village, Laren District, Lamongan Regency. This research uses qualitative research methods with a case study approach. Data were collected through observation and interview process. Informants in this study have been selected with criteria that are in accordance with the research, namely from PKH beneficiaries, PKH group leaders and PKH Facilitators. The results showed 1) The use of PKH assistance. Covering educational needs in the form of providing stationery, school payments, pocket money and transportation, the mentoring process, to increase understanding and awareness of the community in participating in PKH companion activities, communication.

**Keywords :** *Poverty Alleviation, PKH*

## **PENDAHULUAN**

Upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuju stabilitas ekonomi dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dikenal sebagai penentasan kemiskinan. Pemerintah menggunakan dua pendekatan untuk mengatasi kemiskinan: membantu keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan membantu orang yang hidup dalam kemiskinan jangka panjang dengan memberdayakan dan mencegah kemiskinan baru. Kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha adalah tiga program utama yang ditujukan kepada penduduk miskin (djpb.kemenkeu.2022).

Upaya ini sejalan dengan Pasal 34 ayat 2 UU Negara RI Tahun 1945, yang menekankan pembentukan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan (djsn.2021). Dalam situasi seperti ini, pengembangan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan sistem jaminan nasional, yang memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang memenuhi standar tertentu.

Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditetapkan dalam PERMENSOS Nomor 1 tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (PERMENSOS, 2018). Program ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Negara memberdayakan masyarakat lemah dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 (Kurniawan et al., 2020). Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015, yang mengatur percepatan penanggulangan kemiskinan dan membagi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi masyarakat, adalah dasar dari program ini. Keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan diidentifikasi sebagai penerima manfaat PKH, menerima bantuan sosial bersyarat.

Program Keluarga Harapan (PKH) diatur oleh PERMENSOS Nomor 1 tahun 2018, yang menekankan peningkatan taraf hidup dan pendidikan dengan mewajibkan pendidikan selama 12 tahun (pasal 2 huruf a dan pasal 7 huruf b). Meskipun dana bantuan diwajibkan, masih digunakan secara tidak sengaja atau disengaja. Kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan dapat disebabkan oleh kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kondisi rumah dan cara keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya (Ferezagia, 2018). Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57%, atau sekitar 26,36 juta orang. Ini sedikit lebih tinggi dari 9,54% pada Maret 2022, tetapi lebih rendah dari 9,71% pada September 2021. Batas garis kemiskinan naik menjadi Rp535.547 pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan meningkat di perkotaan (7,53%) juga di pedesaan (12,36%).

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat program bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin. Meskipun demikian, pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan. Memberikan bantuan kepada kelompok miskin membutuhkan

jaminan (Kodrat, 2019:5). Sejak tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Bantuan tunai diberikan kepada kepala keluarga miskin, dengan persyaratan dan persyaratan yang harus dipenuhi (pkh.kemsos.go.id, 2019). PKH meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui bantuan uang, barang, dan jasa dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengubah perilaku dan memberikan kemandirian kepada penerima manfaat (Kementerian Sosial, 2018).

Untuk memastikan bahwa data PKH sesuai dengan sasaran, verifikasi dan validasi data dilakukan empat kali setiap tahun. Ini juga membantu menjaga kesehatan dengan memeriksa ibu hamil, memberikan suplemen gizi, memberikan vaksin, dan memantau perkembangan anak. Dengan memastikan kehadiran anak penerima bantuan di sekolah sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh, pendidikan dijamin (Kemensos.go.id). Perilaku ekonomi subsisten diharapkan ditunjukkan oleh penerima PKH, yang hanya menerima bantuan untuk kebutuhan hidup minimal (Huraerah, 2013:11). Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada pengentasan kemiskinan dan mengembangkan program nasional yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pendidikan (Ardiyanto & Prabawati, 2022: 20).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Albertus Bayu Prakoso dan Pambudi Handoyo (2016) di Desa Gebangmalang, Mojokerto, Program Keluarga Harapan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan menyediakan dana untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Meskipun demikian, untuk mencegah penyalahgunaan dana kesehatan, diperlukan perbaikan dalam penggunaan bantuan kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Arif dan Ananda Putri Sabilla (2021) di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa orang miskin lebih cenderung berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peran pemerintah, terutama dalam pengawasan dana bantuan PKH, dianggap penting untuk memastikan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Meskipun bantuan PKH meningkatkan ekonomi, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.

Di daerah perdesaan, seperti Desa Pesanggrahan di Lamongan, orang miskin membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagian besar penduduk Desa Pesanggrahan adalah petani dan memiliki hubungan sosial yang baik, yang meningkatkan semangat mereka untuk melakukan aktivitas pertanian seperti menanam padi atau tander, dan berbagi cerita lucu satu sama lain (Maruwae & Ardiansyah, 2020). Penerima bantuan program PKH berfokus pada ibu karena peran penting mereka dalam mengelola keuangan keluarga dan mengajarkan mereka cara mengelola uang dengan baik (Armalid et al., 2020:215). Dalam penelitian ini, ibu rumah tangga diminta untuk memberikan informasi tentang cara mengelola keuangan keluarga mereka melalui wawancara mendalam. Pola pengeluaran harian keluarga juga berhubungan dengan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (Imama & Yulistiyono, 2020).

Dengan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan usaha mikro, program

Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Pundenswari, 2017:18). Bantuan sosial pemerintah, termasuk PKH, mencakup berbagai jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti subsidi, BLT, dan Program Kartu Sembako. Ini terutama berlaku di bidang pendidikan, di mana mereka membantu siswa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah (Cahyono & Iryani, 2019:408). Untuk menjaga kebutuhan hidup, penerima PKH atau ibu rumah tangga harus melakukan tindakan memilah dan memilih antara kebutuhan penting dan tidak penting. Ini dilakukan untuk mengontrol pengeluaran rumah tangga, menghindari situasi darurat, dan memastikan bahwa dana bantuan PKH digunakan sesuai dengan kebutuhan utama (Prakoso Albertus Bayu, 2016:6).

Meskipun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan mereka, ada rumah tangga yang menggunakan bantuan tersebut secara tidak sesuai, mungkin karena sifat individu yang tidak bisa hidup hemat. Di Desa Pesanggrahan ada 42 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, termasuk 5 informan dengan fungsi di bidang pendidikan, pembiayaan sekolah anak, dan kebutuhan sekolah lainnya. Banyak masyarakat di desa ini salah menggunakan dana bantuan PKH, mengakibatkan pola konsumtif yang melebihi kemampuan keuangan keluarga dan menyebabkan pembekakan keuangan dalam rumah tangga. Salah satu keuntungan dari penelitian ini adalah fokusnya pada penggunaan bantuan PKH dan kendala pelaksanaannya. Penelitian ini menyajikan hasil yang lebih kompleks daripada penelitian lain yang hanya melihat satu sisi atau hanya melihat penggunaan bantuan tanpa mencari kendala pelaksanaannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang berbentuk deskriptif serta memperoleh pemahaman yang lebih karena berusaha menjelaskan konsep dari adanya pengalaman yang telah terjadi secara sadar yang telah dirasakan oleh individu. Studi Kasus bertujuan memahami implementasi PKH dengan melibatkan penerima dana yang tidak menggunakan sesuai fungsinya, mengamati kehidupan sehari-hari secara alamiah, dan mendekati pemahaman lingkungan melalui pengalaman personal dengan manusia secara aktif.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang terletak Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data mengenai: Penggunaan Dana bantuan yang sesuai dan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga yang menerima atau merasakan dari adanya manfaat bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teknik Observasi terus terang atau tersamar, di mana peneliti secara jujur mengungkapkan kepada narasumber bahwa observasi sedang dilakukan untuk memastikan transparansi dan mendapatkan data relevan terkait pertanyaan

penelitian. Setelah data terkumpul, maka dianalisis menggunakan analisis data menurut Miles Huberman. Analisis data menurut Miles Huberman memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dikaji menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Pesanggrahan, terletak di Kecamatan Laren utara Kabupaten Lamongan, dilewati oleh Sungai Bengawan Solo. Masyarakat di sana menggunakan perahu sebagai alat transportasi ke Lamongan Kota, dan sungai tersebut dimanfaatkan sebagai saluran irigasi untuk mengairi sawah, memungkinkan tiga kali masa panen dalam setahun. Penduduknya, mayoritas petani dan pedagang, telah menyadari pentingnya pendidikan, meski masih terdapat beberapa anak yang putus sekolah karena kondisi keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan sejak 2007 bertujuan mengatasi masalah kemiskinan dan telah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak tahun 2013.

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) memiliki peran penting dalam membantu peserta PKH memperoleh hak yang seharusnya mereka terima. Tugas pendamping meliputi validasi, pertemuan bulanan, dan verifikasi, membantu mendeteksi masalah dan memberikan tindak lanjut dengan cepat. Kategori penerima manfaat PKH, seperti ibu hamil dan anak usia dini hingga pendidikan anak SMA, ditentukan berdasarkan indeks dan faktor penerima bantuan sosial pada tahun 2021. Proses pelaksanaan PKH melibatkan pengumpulan data, sosialisasi, validasi, pemenuhan syarat, penyaluran bantuan, serta pendampingan untuk peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemutakhiran data.

### **Penggunaan Bantuan PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin, di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Penelitian terfokus pada pemenuhan biaya pendidikan dan kontrol konsumen sebagai aspek utama dalam implementasi PKH. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Biaya pendidikan, termasuk uang kuliah dan layanan akademik lainnya, bervariasi tergantung pada jenis sekolah, jenjang pendidikan, fasilitas, dan lokasi. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam penelitian di Desa Pesanggrahan, dana bantuan PKH banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, seperti peralatan tulis dan biaya bulanan. Meski beberapa penerima menyadari pentingnya dana ini untuk pendidikan, ada juga yang menggunakannya untuk kebutuhan lain, menunjukkan perluasan pemahaman masyarakat tentang PKH.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan orang tua dan latar belakang pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya cita-cita yang tinggi pada anak. Beberapa keluarga dengan latar belakang petani atau pedagang

mewariskan pekerjaan tersebut kepada anak-anaknya. Strategi untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan melibatkan sosialisasi, baik dari pemerintah daerah, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Perlengkapan alat tulis juga diakui sebagai faktor penting dalam keberhasilan pendidikan anak, memberikan motivasi dan dukungan untuk belajar dengan rajin serta meningkatkan prestasi melalui kegiatan seperti menggambar, melukis, dan mencatat materi pembelajaran.

Proses perubahan perilaku individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak globalisasi yang merambah dengan cepat, memodifikasi gaya hidup dan perilaku masyarakat. Transformasi gaya hidup ini tampak jelas dalam kecenderungan bangsa Indonesia yang semakin terpukau oleh budaya asing, menggeser perhatian dari budaya lokal. Globalisasi tidak hanya merasuki perkotaan, melainkan juga mencapai kawasan pedesaan, menciptakan variasi perilaku yang mencerminkan adopsi unsur-unsur budaya dari luar.

Salah satu dampak perubahan perilaku yang menonjol adalah perilaku konsumtif. Perilaku ini ditandai dengan kecenderungan membelanjakan uang tanpa pertimbangan matang, didorong oleh keinginan pribadi daripada kebutuhan esensial. Pada konteks penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), terlihat kecenderungan penggunaan dana bantuan untuk keperluan di luar pendidikan, seperti kebutuhan dapur, rokok, dan keinginan personal. Hal ini mencerminkan perubahan perilaku konsumtif yang lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan pokok, menunjukkan kompleksitas dan dinamika perubahan dalam masyarakat yang mengalami dampak globalisasi.

Pengeluaran tambahan di luar kebutuhan pokok, terutama dipengaruhi oleh selera pribadi, dapat menghasilkan kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap dan berkaitan dengan upaya meningkatkan kebahagiaan hidup. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), beberapa penerima mungkin menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan sekunder, seperti membeli sepeda anak atau makan-makan di luar. Meskipun beberapa penerima mungkin kurang teredukasi atau tidak diawasi secara ketat, evaluasi rutin oleh petugas perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan.

Pengeluaran tambahan di luar kebutuhan pokok, terutama dipengaruhi oleh selera pribadi dapat menghasilkan kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap dan berkaitan dengan upaya meningkatkan kebahagiaan hidup. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), beberapa penerima mungkin menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan sekunder, seperti membeli sepeda anak atau makan-makan di luar. Meskipun beberapa penerima mungkin kurang teredukasi atau tidak diawasi secara ketat, evaluasi rutin oleh petugas perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan. Terdapat pula indikasi perilaku konsumtif, di mana beberapa penerima menggunakan dana untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar atau terlalu fokus pada keinginan pribadi. Sehingga, pengelolaan dana bantuan PKH perlu mendapatkan perhatian lebih untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan program dan memberikan dampak positif pada keluarga penerima manfaat

### **Kendala Yang Dihadapi**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan menghadapi sejumlah kendala terutama terkait dengan indikator Pendamping Sosial. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam verifikasi nama-nama warga penerima bantuan, yang dapat menghambat pencairan bantuan. Terdapat pula kesalahan penulisan nama penerima yang dapat menimbulkan kendala lebih lanjut. Komunikasi antara pendamping dan penerima bantuan juga masih mengalami hambatan, memberikan dampak pada pelaksanaan PKH. Selain itu, kendala sarana dan prasarana yang belum memadai turut mempersulit kegiatan pendampingan, sementara kurangnya komitmen masyarakat dalam mengikuti program-program yang disusun oleh PKH seperti program sekolah, kesehatan, dan sosialisasi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Undang-undang nomor 18 menegaskan peran penting pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Pendamping juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menangani isu atau masalah keluarga penerima bantuan PKH. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan, menggambarkan bahwa pengawasan penting untuk menangani penyimpangan dan memastikan kinerja sesuai harapan.

Masyarakat penerima bantuan PKH di Kelurahan Pelambuan menghadapi kendala pemahaman akan hak dan kewajiban karena frekuensi sosialisasi yang rendah, menyebabkan penggunaan dana PKH untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan pendidikan. Pelaksanaan PKH dihadapkan pada kendala komunikasi, kurangnya sarana prasarana, serta minimnya komitmen masyarakat terhadap program, terutama dalam mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan. Sementara itu, peran pendamping sangat penting dalam memberikan pengarahan, motivasi, komunikasi, serta pengendalian, dengan pengawasan yang bertujuan mengukur keberhasilan pelaksanaan penyaluran bantuan PKH.

Pendampingan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memastikan pemenuhan kewajiban KPM PKH sesuai ketentuan. Fungsi pendamping mencakup fasilitasi, mediasi, dan advokasi, serta melibatkan pertemuan bulanan, pemastian bantuan sesuai sasaran, dan pendampingan terhadap penggunaan dana. Sekolah PKH juga memberikan edukasi kepada orang tua, seperti penggunaan gadget, namun terdapat tantangan kehadiran KPM dan variasi pengetahuan. Kendala yang dihadapi di Desa Pesanggrahan termasuk kesulitan dalam pengumpulan data, komunikasi yang kurang efektif, dan pemahaman terbatas tentang tugas pendamping PKH. Wawancara mengungkapkan bahwa adaptasi dan integrasi terkait penggunaan dana PKH masih perlu ditingkatkan, dan masyarakat berharap bantuan yang diberikan dapat lebih memenuhi kebutuhan mereka.

Peran ketua kelompok dalam P2K2 sangat penting untuk membantu pendamping dalam kegiatan kelas, termasuk penyuluhan tentang keluarga, pengaturan keuangan rumah tangga, dan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta

PKH akan pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan; meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya aktifitas masyarakat saat kegiatan berlangsung, mengakibatkan kurangnya kelancaran dalam penyampaian informasi.

Ketua kelompok melakukan analisis kehadiran peserta penerima PKH dalam setiap kelas, menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, meskipun dijalankan oleh Pendamping Sosial; adanya P2K2 bertujuan mengedukasi KPM agar mandiri. Koordinator daerah membantu pelaporan dan koordinasi di tingkat kabupaten/kota. Kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemeriksaan merata dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap penggunaan PKH, terungkap dari wawancara yang menyoroti kurangnya partisipasi dan implementasi informasi yang disampaikan saat sekolah PKH.

Peran ketua kelompok sangat penting dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan kualifikasi seperti objektivitas, ketangkasan komunikasi, ketegasan, dan kesadaran diri. Meskipun program memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan, masih terdapat kendala seperti minimnya partisipasi aktif masyarakat, kurangnya pemeriksaan merata, dan ketidakpatuhan terhadap penggunaan dana PKH. Komunikasi terbatas dan kurangnya pemahaman tentang tujuan PKH juga menjadi hambatan dalam implementasi program.

Kemiskinan, yang diartikan sebagai keadaan keluarga yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup harian, menjadi fokus penelitian dengan 6 subjek, termasuk 5 penerima PKH dan 1 pendamping PKH di Desa Pesanggrahan. Kriteria penerima PKH mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun program bertujuan meningkatkan kualitas hidup, terdapat tantangan seperti minimnya pemahaman tentang program, pola pengeluaran yang beragam, dan perubahan perilaku penerima bantuan. Teori perubahan sosial dan kesejahteraan sosial diaplikasikan untuk melihat dampak program, sementara teori perilaku terencana membantu memahami bagaimana penerima bantuan memanfaatkan dana sesuai rencana pribadi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menggunakan bantuan pemerintah, seperti PKH, untuk meningkatkan taraf pendidikan dengan membayar berbagai biaya sekolah dan membeli perlengkapan. Penggunaan dana juga mencakup kebutuhan pribadi, seperti skincare, pupuk untuk pertanian, dan kebutuhan rumah tangga. Kendala dalam penelitian meliputi kesulitan memperoleh data dari penerima PKH dan permasalahan internal serta eksternal dalam proses perencanaan. Komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan penggunaan dana PKH perlu diperkuat. Penelitian menyoroti permasalahan penyalahgunaan dana PKH dan kendala pelaksanaannya, dengan kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif, namun perlu peningkatan komunikasi dan pemahaman masyarakat untuk optimalitas program.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs.Hamdani Azhari, MM. selaku kepala Dinas sosial Kabupaten Lamongan, yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian skripsi terhadap Masyarakat penerima bantuan PKH. Kemudian terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk artikel ini, serta terima kasih banyak kepada pembimbing yang telah memberikan saran sehingga artikel ini menjadi lebih baik. Terima kasih paling banyak kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam proses mengerjakan Skripsi

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, A. F., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan). *Publika*, 13–24. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p13-24>
- Armalid, I., Purboningsih, E. R., Widiastuti, T. R., & Ninin, R. H. (2020). Exploration Study: Analysis of Supporting Factors of Mothers from Beneficiary Families of the Hope Family Program in Achieving Independent Graduation. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3), 209–220.
- Asas dan tujuan prinsip SJSN <https://www.djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>
- Cahyono, S. A. T., & Iryani, S. W. (2019). Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), 401–414.
- Ferezagia. (2018). Data Baru BPS : Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–13.
- Imama, W. N., & Yulistiyono, H. (2020). Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 5(2), 221–232. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v5i2.14899>
- Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 126–149. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.23>
- Kodrat, D. D. (2019). Urgensi Perubahan Pola Pikir Dalam Membangun Pendidikan Bermutu. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v2i1.23>
- Maruwae, A., & Ardiansyah, A. (2020). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 39–53. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7106>

- Prakoso Albertus Bayu, P. H. (2016). Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Albertus Bayu Prakoso Pambudi Handoyo Abstrak. 04, 1–9.
- Pundenswari, P. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 13–21. [www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)
- Yulianto Trimo. Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/beritaterbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>